

STUDI KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PROVINSI SUMATRA, JAWA DAN BALI SELAMA PERIODE 2018-2022

STUDY OF INCOME INEQUALITY IN SUMATRA, JAVA AND BALI PROVINCES DURING THE PERIOD 2018-2022

Agung Supriyanto¹, Yuni Prihadi Utomo²

Agungsupriyanto4012@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta

yp196@ums.ac.id

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRAK: Ketimpangan pendapatan adalah masalah umum di negara berkembang dan perlu diukur untuk memahami kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti ketimpangan pendapatan menggunakan koefisien Gini untuk mengevaluasi distribusi pendapatan dalam masyarakat dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel, yaitu kombinasi data *time series* dari tahun 2018-2022 dan *data cross section* yang diperoleh dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Badan Pusat Statistik. Hasil penelitian menunjukkan model yang terestimasi terpilih *Fixed Effect Model* (FEM), dengan R^2 sebesar 0,976718. Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Tingkat Ketenagakerjaan, dan Indeks Inklusi Keuangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, hasil menunjukkan bahwa *Foreign Direct Investment* (FDI) dan Upah Minimum Provinsi (UMP) memiliki pengaruh yang signifikan. Provinsi DI Yogyakarta memiliki ketimpangan terbesar, sedangkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki ketimpangan terendah.

Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal, Penanaman Modal Asing, Tenaga Kerja, Indeks Inklusi Keuangan, Upah Minimum Rill.

ABSTRACT: *The only thing that matters is that everyone in the area is bored and looks for ways to improve their oral health. This study examines the effect of Gini's coefficient on the distribution of glucose in the blood and determines the factor-factor that is most important. The analysis carried out in this study is a data panel review, namely a combination of time series data from 2018-2022 and cross section data provided by Bank Indonesia, Central Bank and National Statistics Office. The experimental model used is the Fixed Effect Model (FEM) with R^2 as 0.976718. The Foreign Direct Investment (FDI) index is based on the Foreign Direct Investment (FDI) principle, and the Index includes no significant changes in the foreign exchange rate, which in turn increases the foreign direct investment (FDI) and the Minimum Provincial Investment Rate. (UMP) has significant implications. The province of Yogyakarta has a large number of inhabitants, while the province of East Java has a large number of inhabitants.*

Keywords: *Fiscal Decentralization, Foreign Direct Investmen, Employment, Financial Inclusion Index, Real Minimum Wage.*

A. PENDAHULUAN

Pendapatan per kapita merupakan ukuran jumlah uang yang diperoleh setiap orang di suatu negara atau wilayah geografis. Ini dapat digunakan untuk menentukan pendapatan rata-rata per orang untuk suatu daerah dan untuk mengevaluasi standar hidup dan kualitas hidup penduduknya. Peningkatan pendapatan per kapita tidak selalu menunjukkan kemajuan ekonomi suatu negara, itu hanya menunjukkan rata-rata pendapatan tanpa mempertimbangkan distribusi pendapatan, yang dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan antar individu. (Arsyad, 2016)

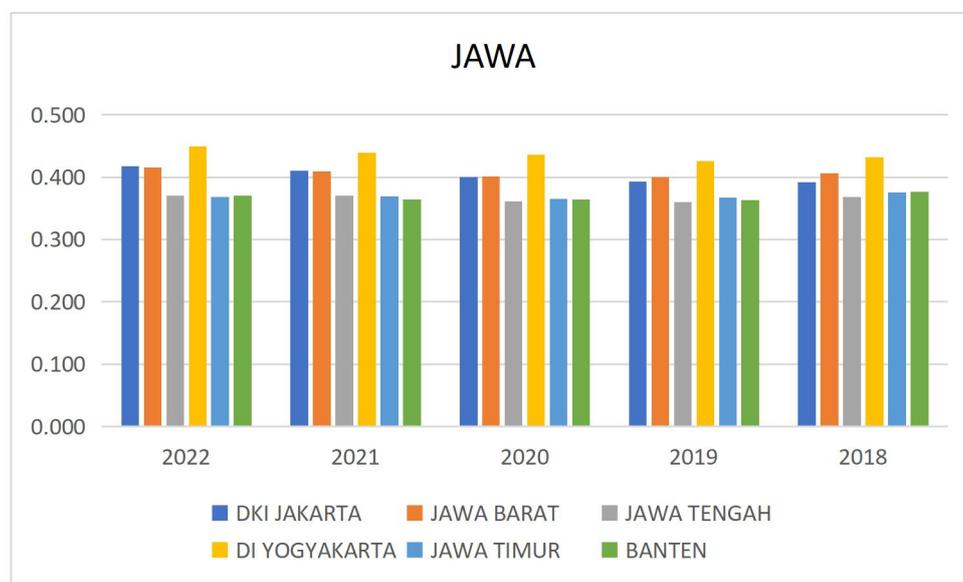
Ketimpangan pendapatan merupakan suatu kondisi di mana distribusi pendapatan dalam masyarakat tidak merata. Ketimpangan adalah salah satu masalah umum di negara-negara berkembang (NSB) Dewi et al. (2022). Salah satu cara untuk mengukur kesejahteraan masyarakat adalah dengan melihat seberapa ketimpangan pendapatannya. Ketimpangan dalam pendapatan ini

diukur salah satunya dengan koefisien Gini. Rasio ini berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai 0 mencerminkan distribusi pendapatan yang sempurna, sementara nilai 1 menunjukkan ketimpangan sempurna. (Todaro & Smith, 2015)

Salah satu target dari Sustainable Development Goals yang ditandatangani oleh 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk Indonesia untuk memastikan adanya kesempatan yang sama serta mengurangi ketimpangan pendapatan (Muslikhah, 2019). Pemerintah Indonesia menargetkan untuk mengurangi ketimpangan di Indonesia hingga 0,370-0,380 pada tahun 2024. Target ini ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, itu yang kemudian mendasari pemerintah untuk menetapkan kebijakan antara lain meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan dan meningkatkan pemerataan pembangunan.

Sebagai wilayah sentral Indonesia, peningkatan ketimpangan ekonomi di Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali telah menjadi perhatian utama. Ini ditunjukkan oleh perbedaan yang ada antara wilayah yang lebih maju dan wilayah yang lebih terbelakang atau kurang maju. Ketika kegiatan ekonomi terkonsentrasi di suatu daerah tertentu, hal itu secara langsung berdampak pada perbedaan pendapatan di antara daerah tersebut. Grafik 1, 2 dan 3 menunjukkan bahwa perkembangan tingkat ketimpangan di Jawa, Sumatera dan Bali, selama tahun 2018 hingga 2022.

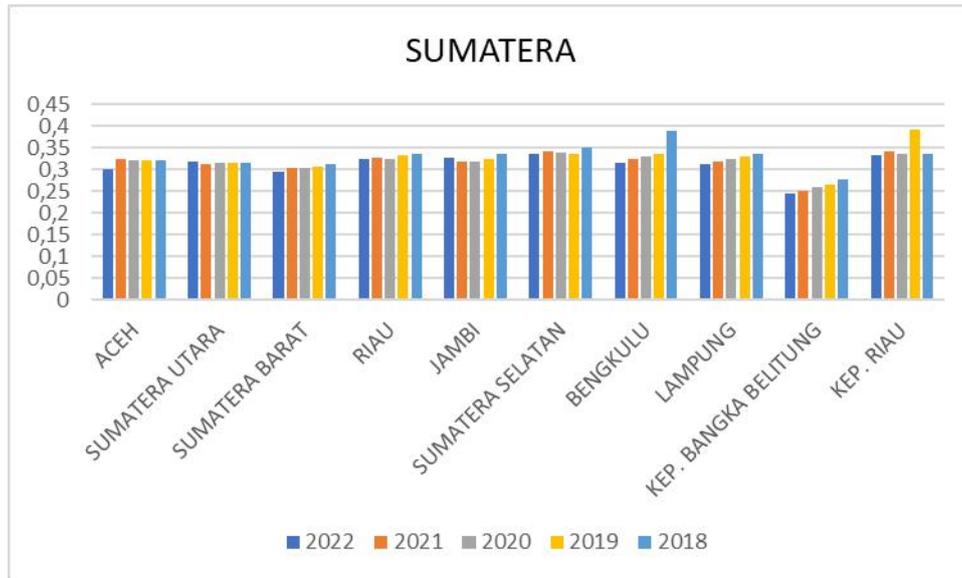
Grafik 1. Indeks Gini Antar Provinsi di Jawa



Sumber: Data Badan Pusat Statistik Indonesia

Berdasarkan Grafik 1 dapat dijelaskan bahwasanya kondisi ketimpangan pendapatan di Provinsi Pulau Jawa rata-rata dalam 5 tahun terakhir tergolong sedang dengan Rasio Gini sebesar 0,391. Namun di masing-masing provinsi di Jawa justru mengalami tingkat ketimpangan yang berbeda setiap wilayah. Provinsi yang memiliki tingkat ketimpangan tertinggi terdapat pada Provinsi D.I Yogyakarta dengan Rasio Gini sebesar 0,436. Sebaliknya, Provinsi Jawa tengah memiliki tingkat ketimpangan yang sedikit lebih rendah dalam lima tahun terakhir, dengan Rasio Gini sebesar 0,366.

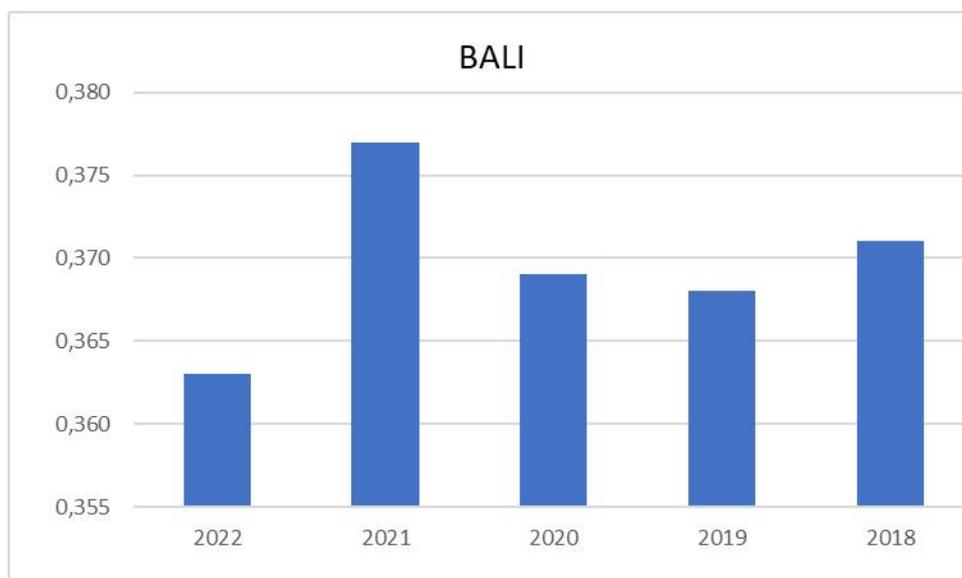
Grafik 2. Indeks Gini Antar Provinsi di Sumatera



Sumber: Data Badan Pusat Statistik Indonesia

Berdasarkan Grafik 2 dapat dijelaskan bahwasanya kondisi ketimpangan pendapatan di Provinsi Pulau Sumatera rata-rata dalam 5 tahun terakhir ketimpangan tergolong sedang dengan Rasio Gini sebesar 0,320. Namun di masing-masing provinsi di Sumatera justru mengalami tingkat ketimpangan yang berbeda-beda antar wilayah. Provinsi yang memiliki tingkat ketimpangan tertinggi terdapat pada Provinsi Kepulauan Riau dengan Rasio Gini sebesar 0,348. Sebaliknya, Provinsi Bangka Belitung memiliki tingkat ketimpangan yang jauh lebih rendah dalam lima tahun terakhir, dengan Rasio Gini sebesar 0,246.

Grafik 3. Indeks Gini Antar Provinsi di Bali



Sumber: Data Badan Pusat Statistik Indonesia

Berdasarkan Grafik 3 dapat dijelaskan bahwasanya kondisi ketimpangan pendapatan di Provinsi Pulau Bali rata-rata dalam 5 tahun terakhir ketimpangan tergolong sedang dengan Rasio Gini sebesar 0,370. Namun setiap tahun mengalami fluktuasi contohnya di tahun 2021 Provinsi Bali mengalami tingkat ketimpangan yang tertinggi dengan Rasio Gini sebesar 0,377. Setahun setelah itu provinsi Bali mengalami tingkat ketimpangan yang terendah selama lima tahun terakhir, yakni dengan Rasio Gini sebesar 0,363. Tingkat ketimpangan di Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali selalu berubah setiap tahun, seperti yang ditunjukkan oleh ketiga grafik di atas, dimana tingkat ketimpangan yang paling tinggi ada di Pulau Jawa dengan Rasio Gini sebesar 0,391.

Sukirno (2006) menyatakan bahwa ketimpangan adalah istilah yang mengacu pada standar hidup yang tidak sama di seluruh masyarakat. Perbedaan ini menyebabkan tingkat pembangunan berbeda-beda di berbagai daerah dan wilayah. Akibatnya, ini menyebabkan jurang kesejahteraan di antara mereka. Sementara Robert Solow menyebut bahwa ketimpangan pendapatan adalah masalah yang kompleks yang dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Dia berpendapat bahwa peningkatan ekonomi dan pembangunan sosial dapat terhambat oleh ketimpangan pendapatan dan menimbulkan kemiskinan. (Todaro & Smith, 2015)

Salah satu teori Simon Kuznet (1995), menyatakan bahwa ada hubungan antara ketimpangan dan pertumbuhan Ekonomi. Kuznet menyodorkan suatu hipotesis mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan ketimpangan distribusi pendapatan di antara penduduknya berbentuk U terbalik. Hal ini menyatakan bahwa pada awal pertumbuhan, ketimpangan distribusi pendapatan semakin tinggi. Sedangkan pendapat (Houghton dan Khandker, 2009) menyatakan ketimpangan atau inequality adalah distribusi kepemilikan, seperti pendapatan atau konsumsi, di antara seluruh populasi (masyarakat). Dalam analisis kemiskinan, ketimpangan pada dasarnya didasarkan pada keyakinan bahwa kesejahteraan seseorang bergantung pada posisi ekonomi mereka terhadap orang lain dalam kelompok masyarakat yang sama.

Durlauf (1987), juga berpendapat bahwa mempelajari bagaimana pendapatan dan kekayaan didistribusikan di masyarakat menekankan jika keterampilan, pendidikan, teknologi, globalisasi, dan kebijakan pemerintah adalah faktor utama yang menyebabkan redistribusi yang tidak adil. Durlauf menekankan bahwa untuk membuat kebijakan yang efektif, seperti investasi dalam pendidikan, jaring pengaman sosial, dan kebijakan pajak progresif, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang akar masalah. Sedangkan menurut Kuncoro (2006), menyatakan bahwa ketimpangan mengacu pada standar hidup yang relatif di seluruh masyarakat karena kesenjangan antar wilayah, yang disebabkan oleh perbedaan dalam faktor produksi dan sumber daya yang tersedia. Perbedaan ini menyebabkan tingkat pembangunan dan distribusi pendapatan di setiap wilayah berbeda-beda, yang mengakibatkan perbedaan dalam kesejahteraan.

Penelitian sebelumnya menemukan banyak faktor ekonomi dan sosial mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Indonesia, Santoso & Mukhlis (2021) menemukan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif terhadap Ketimpangan. Hanifah & Dewi (2021) menemukan Ketimpangan Pendapatan dipicu oleh Aglomerasi, Ketimpangan Pendidikan, dan Ketimpangan Sumber Daya Manusia. Dwi & Kusumaning (2022) menemukan Akses Listrik, Sanitasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Ketimpangan, dengan Akses Listrik dan Sanitasi berdampak negatif dan IPM berdampak positif.

Variabel lain seperti Indeks Inklusi Keuangan dan Upah Minimum Provinsi juga ditemukan berpengaruh negatif terhadap Ketimpangan, Muslikhah (2019). Hindun et al. (2019) menemukan Pendidikan dan Kemiskinan berperan dalam mengurangi Ketimpangan di Indonesia. Kharisman & Wahyuni (2021), Yoertiara & Feriyanto (2022), Kiak (2020), Irmawatty et al. (2022) menemukan Infrastruktur, Penanaman Modal Asing, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Pertumbuhan Ekonomi memiliki dampak signifikan terhadap Ketimpangan di berbagai wilayah dan periode. Farhan dan Sugianto (2022) menemukan IPM dan Kemiskinan memengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa. Firmansyah et al. (2022) menemukan Nilai Tukar Petani dan IPM memengaruhi Ketimpangan di Pulau Sumatera.

Berdasarkan latar belakang di muka, penelitian ini akan mengamati pengaruh Desentralisasi Fiskal, *Foreign Direct Investment* (FDI), Indeks Inklusi Keuangan Upah Minimum Rill dan Tenaga Kerja terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Pulau Sumatera, Jawa dan Bali periode Januari 2018 hingga Desember 2021.

B. METODE PENELITIAN

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan model ekonometrik sebagai berikut:

$$INQ_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 DAU_{it} + \alpha_2 DAK_{it} + \alpha_3 DBH_{it} + \alpha_4 FDI_{it} + \alpha_5 EMP_{it} + \alpha_6 UMP_{it} + \alpha_7 IIK_{it} + \epsilon_{it}$$

di mana:

<i>INQ</i>	= Ketimpangan Pendapatan (Rasio gini)
<i>DAU</i>	= Dana Alokasi Umum (Milyar Rupiah)
<i>DAK</i>	= Dana Alokasi Khusus (Milyar Rupiah)
<i>DBH</i>	= Dana Bagi Hasil (Milyar Rupiah)
<i>FDI</i>	= <i>Foreign Direct Investment</i> (Juta Dolar AS)
<i>EMP</i>	= <i>Employment</i> (orang)
<i>UMP</i>	= Upah Minimum Rill Provinsi (Rupiah)
<i>IIK</i>	= Indeks Inklusi Keuangan (%)
ϵ_{it}	= Error term (faktor kesalahan)
α_0	= Konstanta
$\alpha_1 \dots \alpha_7$	= Koefisien regresi variabel independen
<i>i</i>	= Data Cross Section
<i>t</i>	= Data Time Series.

Model ekonometrik di atas merupakan kombinasi dari model Santoso & Mukhlis (2021) dan model (Muslikhah, 2019). Variabel Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, *Foreign Direct Investment*, dan Tenaga Kerja diambil dari model Santoso & Mukhlis (2021) kemudian variabel Indeks Inklusi Keuangan dan Upah Minimum Rill Provinsi diambil dari model (Muslikhah, 2019). Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), diduga berpengaruh positif terhadap Ketimpangan Pendapatan, sedangkan *Foreign Direct Investment* (FDI) dan *Employment* (EMP), Indeks inklusi keuangan (IIK) dan upah minimum rill provinsi (UMP) diduga memiliki pengaruh negatif terhadap Ketimpangan Pendapatan.

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data panel yaitu kombinasi dari *time series* dan *cross section*. Data *time series* dari tahun 2018-2022, sedangkan data *cross section* yang digunakan diperoleh dari beberapa sumber, yakni Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik. Sumber data diperoleh dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan maupun Badan Pusat Statistik yang dapat dilihat di *website* masing-masing.

Tahap estimasi analisis regresi data panel akan meliputi estimasi parameter model ekonometrik dengan pendekatan *Pooled Least Square* (PLS), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM), pemilihan model terestimasi terbaik dengan uji Chow dan uji Hausman dan jika diperlukan uji *Lagrange Multiplier*; uji kebaikan model pada model terestimasi terpilih, dan uji validitas pengaruh variabel independen pada model terestimasi terpilih.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil estimasi model ekonometrik di muka dengan pendekatan *Pooled Least Square* (PLS), *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM) beserta uji pemilihan modelnya terangkum pada Tabel 1.

Tabel 1
Hasil Estimasi Model Ekonometrik Regresi Data Panel-Cross Section

Variabel	Koefisien Regresi		
	PLS	FEM	REM
<i>C</i>	2.604851	0.887414	1.654205
<i>LogDAU</i>	-0.045435	-0.010696	-0.036765
<i>LogDAK Fisik & Nonfisik</i>	0.013631	0.011239	0.030043
<i>LogDBH</i>	-0.000236	0.001706	-0.003240
<i>LogFDI</i>	0.000709	0.004307	0.004097
<i>LogEMP</i>	0.013730	-0.000165	0.001864
<i>LogUMP</i>	-0.154533	-0.038311	-0.087830
<i>IJK</i>	0.001274	-0.000166	0.000438
R^2	0.777858	0.976718	0.401560
<i>Adjusted R²</i>	0.756260	0.967156	0.343379
Statistik <i>F</i>	36.01663	102.1446	6.901840
Prob. Statistik <i>F</i>	0.000000	0.000000	0.000003
Uji Pemilihan Model			
(1) Chow			
Cross-Section $F(16,56) = 29.895316$; Prob. $F(16,56) = 0,0000$			
(2) Hausman			
Cross-Section random $\chi^2(7) = 23.537559$; Prob. $\chi^2(7) = 0,0014$			

Sumber: Badan Pusat Statistik, Otoritas Jasa Keuangan, Kemenkeu, diolah

Uji Chow dan uji Hausman memperlihatkan bahwa FEM terpilih sebagai model terestimasi terbaik, dapat dilihat dari probabilitas atau signifikansi empirik statistik F bernilai 0,0000 ($< 0,01$) dan statistik χ^2 bernilai 0,0014 ($< 0,01$). Hasil estimasi lengkap dari model terestimasi FEM, terlihat pada Tabel 2 dan Tabel 3.

Tabel 2
Model Estimasi *Fixed Effect Model* (FEM)

$$\begin{aligned}
 INQ &= 0,887414 - 0,010696 \log(DAU) + 0,011239 \log(DAK) \\
 &\quad (0,7338) \quad (0,5499) \\
 &+ 0,001706 \log(DBH) + 0,004307 \log(FDI) - 0,000165 \log(EMP) \\
 &\quad (0,7304) \quad (0,0205)** \quad (0,9519) \\
 &- 0,038311 \log(UMP) - 0,000166 IJK \\
 &\quad (0,0932)*** \quad (0,5771) \\
 \hline
 R^2 &= 0,976718; DW = 1,264095; F = 102,1446; Prob.F = 0,000000
 \end{aligned}$$

Sumber: Lampiran 1. Keterangan: *Signifikan pada $\alpha = 0,01$; **Signifikan pada $\alpha = 0,05$; ***Signifikan pada $\alpha = 0,10$; Angka dalam kurung adalah probabilitas nilai statistic t.

Tabel 3
Efek dan Konstanta Wilayah

No	Wilayah	Efek	Konstanta
1	Aceh	-0.007589	0,879825
2	Sumatera Utara	-0.029118	0,858296
3	Sumatera Barat	-0.033093	0,854321
4	Riau	-0.018937	0,868477
5	Jambi	-0.007893	0,879521
6	Sumatera Selatan	-0.002417	0,884997
7	Bengkulu	0.000766	0,888180
8	Lampung	-0.018439	0,868975
9	Kep. Bangka Belitung	-0.060401	0,827013
10	Kep. Riau	-0.000534	0,886880
11	DKI Jakarta	0.030128	0,917542
12	Jawa Barat	0.033853	0,921267
13	Jawa Tengah	-0.001416	0,885998
14	DI Yogyakarta	0.093148	0,980562
15	Jawa Timur	0.003530	0,890944
16	Banten	0.012525	0,899939
17	Bali	0.030696	0,918110

Sumber: Lampiran 1, diolah

Dari Tabel 2 terlihat model terestimasi FEM eksis dengan probabilitas atau signifikansi empirik statistik F bernilai 0,000000 ($< 0,1$), dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,976718; yang menunjukkan model terestimasi FEM memiliki daya ramal tinggi. Secara terpisah dari tujuh variabel dalam model ekonometrik, dua variabel yakni *Foreign Direct Investment* dan Upah Minimum Rill Provinsi berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan dengan masing-masing probabilitas atau signifikansi empirik statistic t sebesar 0,0205 ($< 0,05$) dan 0,0932 ($< 0,1$).

Variabel *Foreign Direct Investment* memiliki koefisien regresi sebesar 0,004307, dengan pola hubungan linear-logaritma. Artinya, apabila *Foreign Direct Investment* naik sebesar 1%, maka Ketimpangan Pendapatan akan mengalami kenaikan sebesar $0,004307 \div 100 = 0,00004307$ Gini. Sebaliknya, jika *Foreign Direct Investment* turun sebesar 1%, maka Ketimpangan Pendapatan akan mengalami penurunan sebesar $0,004307 \div 100 = 0,00004307$ Gini.

Variabel Upah Minimum Rill Provinsi memiliki koefisien regresi sebesar 0,038311, dengan pola hubungan linear-logaritma. Artinya, apabila Upah Minimum Rill Provinsi naik sebesar 1%, maka Ketimpangan Pendapatan akan mengalami penurunan sebesar $0,038311 \div 100 = 0,00038311$ Gini. Sebaliknya, jika Upah Minimum Rill Provinsi turun sebesar 1%, maka Ketimpangan Pendapatan akan mengalami kenaikan sebesar $0,038311 \div 100 = 0,00038311$ Gini.

Nilai konstanta masing-masing Provinsi dapat dilihat pada Tabel 3. Nilai konstanta tertinggi dimiliki oleh Provinsi DI Yogyakarta, yaitu sebesar 0,980562. Artinya, terkait dengan pengaruh variabel Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik & Nonfisik, Dana Bagi Hasil, *Foreign Direct Investment*, *Employment*, Upah Minimum Rill Provinsi dan Indeks Inklusi Keuangan terhadap Ketimpangan Pendapatan, maka Provinsi DI Yogyakarta cenderung memiliki tingkat Ketimpangan Pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan negara lainnya. Setelah Provinsi DI Yogyakarta, dua

Provinsi dengan konstanta tertinggi adalah Jawa Barat dan Bali. Nilai konstanta terendah dimiliki Provinsi Kep. Bangka Belitung, yaitu sebesar 0,827013. Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik & Nonfisik, Dana Bagi Hasil, *Foreign Direct Investment*, *Employment*, Upah Minimum Rill Provinsi dan Indeks Inklusi Keuangan terhadap Ketimpangan Pendapatan, Provinsi Kep. Bangka Belitung cenderung memiliki tingkat Ketimpangan Pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi lainnya, dua Provinsi dengan konstanta terendah adalah Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

Interpretasi Ekonomi

Ketimpangan Pendapatan di 17 Provinsi di Pulau Jawa, Sumatera dan Bali selama periode 2018-2022 ternyata dipengaruhi oleh *Foreign Direct Investment* dan Upah Minimum Rill Provinsi. Sementara itu, variabel Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik & Nonfisik, Dana Bagi Hasil, *Employment* dan Indeks Inklusi Keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di 17 Provinsi di Pulau Jawa, Sumatera dan Bali.

Dana Alokasi Umum (DAU) ditemukan tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di 17 Provinsi di Pulau Jawa, Sumatera, dan Bali. Ini berarti bahwa transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah melalui DAU tidak secara langsung mengurangi ketimpangan pendapatan antar individu atau kelompok masyarakat. Salah satu faktor yang membuat DAU tidak maksimal adalah bahwa dana yang diterima daerah dari DAU mungkin tidak sepenuhnya digunakan untuk mengurangi ketimpangan. Sementara, Harun et al. (2022) menemukan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima daerah berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan, ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa DAU dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat melalui peningkatan investasi, infrastruktur, dan layanan publik, terutama di daerah miskin.

Dana Alokasi Khusus (DAK) ditemukan tidak memiliki pengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di 17 Provinsi di Pulau Jawa, Sumatera, dan Bali. Ini menunjukkan bahwa DAK, baik secara fisik maupun non-fisik, tidak secara langsung membantu meningkatkan kesetaraan pendapatan antar individu atau kelompok masyarakat. Meskipun DAK dimaksudkan untuk mendukung program prioritas nasional dan daerah, termasuk infrastruktur dan layanan publik, dampaknya terhadap ketimpangan pendapatan masih belum jelas. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan DAK dapat menyebabkan penyimpangan dan inefisiensi dan menghambat pencapaian tujuan program. Permasalahan dalam pengalokasian dan penggunaan DAK berdampak juga pada proses pembangunan daerah tidak berjalan optimal sehingga tidak bisa mampu memberikan pengaruh terhadap upaya pengurangan ketimpangan, sejalan dengan penelitian. (Ridho & Wijayanti, 2022)

Dana Bagi Hasil (DBH) ditemukan tidak memiliki pengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di 17 Provinsi di Pulau Jawa, Sumatera, dan Bali. Ini karena sistem pengalokasian DBH yang didasarkan pada kontribusi tiap daerah kepada pusat. Provinsi atau daerah yang memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah dan pajak yang tinggi menerima lebih banyak proposal. Tempat otomatis yang memiliki Daerah yang biasanya tidak memiliki banyak sumber daya alam atau bahkan tidak memiliki sama sekali akan menjadi lebih kaya dengan sumber daya pajak dan alam. Pada akhirnya, pembangunan di setiap wilayah menjadi tidak merata, yang mengakibatkan peningkatan ketimpangan pendapatan, sejalan dengan penelitian. (Santoso & Mukhlis, 2021)

Foreign Direct Investment (FDI) ditemukan memberikan pengaruh positif terhadap Ketimpangan Pendapatan di 17 Provinsi di Pulau Jawa, Sumatera, dan Bali. Hal ini disebabkan oleh peningkatan investasi dan penanaman modal asing di Indonesia melalui hubungan internasional, baik bilateral maupun multilateral. Hubungan ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, yang pada gilirannya mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan, sejalan dengan penelitian. (Restulillah & Ariusni, 2020)

Employment (EMP) ditemukan tidak memiliki pengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di 17 Provinsi di Pulau Jawa, Sumatera, dan Bali. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti perbedaan

upah, akses ke pendidikan dan keterampilan, kepemilikan aset, dan kebijakan pemerintah, adalah penyebabnya. Jenis pekerjaan juga berpengaruh, karena pekerjaan dengan upah tinggi dan keterampilan cenderung memiliki kontribusi yang lebih rendah terhadap ketimpangan pendapatan dibandingkan dengan pekerjaan dengan upah rendah dan keterampilan rendah. Pentingnya distribusi pendapatan di antara mereka yang bekerja juga merupakan faktor penting yang memengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan secara keseluruhan.

Upah Minimum Rill Provinsi (UMP) ditemukan memiliki pengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di 17 Provinsi di Pulau Jawa, Sumatera, dan Bali. Hal ini disebabkan karena upah minimum dapat mengurangi perbedaan pendapatan dengan meningkatkan pendapatan rumah tangga, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan daya beli, sehingga menyempitkan perbedaan pendapatan antara rumah tangga berpenghasilan rendah dan tinggi. Selanjutnya, UMP dapat mendorong redistribusi pendapatan dengan meningkatkan proporsi pendapatan yang diterima oleh pekerja, sejalan dengan penelitian. (Muslikhah, 2019)

Indeks Inklusi Keuangan (IIK) ditemukan tidak memiliki pengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di 17 Provinsi di Pulau Jawa, Sumatera, dan Bali. Hal ini menunjukkan kemungkinan bahwa ada perbedaan dalam penggunaan dan akses ke layanan keuangan di antara berbagai kelompok pendapatan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hambatan, seperti kurangnya pengetahuan tentang keuangan dan preferensi risiko yang berbeda di antara kelompok tersebut. Selain itu, kebijakan pendapatan dan faktor struktural mungkin memiliki pengaruh yang lebih besar dalam menentukan tingkat ketimpangan. Meskipun demikian, inklusi keuangan masih sangat penting untuk mengurangi kemiskinan, memberdayakan usaha kecil dan ekonomi individu, dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, sejalan dengan penelitian. (Kusuma & Indrajaya, 2020)

D. PENUTUP

Fixed Effect Model (FEM) terpilih sebagai model terestimasi terbaik. Model terestimasi ini eksis dengan R^2 sebesar 0,976718. Secara parsial *Foreign Direct Investment* dan Upah Minimum Rill Provinsi berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan. Sedangkan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik & Nonfisik, Dana Bagi Hasil, *Employment* dan Indeks Inklusi Keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan. Ketimpangan Pendapatan tertinggi teridentifikasi pada Provinsi DI Yogyakarta, sedangkan Ketimpangan Pendapatan terendah dimiliki Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH) tidak signifikan dalam memengaruhi ketimpangan pendapatan, kemungkinan disebabkan oleh sejumlah faktor seperti inefisiensi dalam pengelolaan dana publik dan ketidakmerataan pembangunan daerah. Sementara itu, investasi asing (FDI) menunjukkan dampak positif yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, yang tercermin dalam peningkatan investasi serta penciptaan lapangan kerja. Namun, tingkat ketenagakerjaan tidak memperlihatkan pengaruh yang signifikan, kemungkinan disebabkan oleh perbedaan dalam upah, akses pendidikan, dan kebijakan pemerintah. Sebaliknya, upah minimum provinsi (UMP) menunjukkan dampak negatif yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, dengan meningkatkan pendapatan rumah tangga dan daya beli. Meskipun demikian, indeks inklusi keuangan tidak memperlihatkan dampak yang signifikan, mungkin karena perbedaan akses dan penggunaan layanan keuangan di antara kelompok pendapatan. Secara keseluruhan, temuan ini mengindikasikan bahwa transfer dana pemerintah, investasi asing, dan regulasi upah minimum provinsi memiliki peran yang penting dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan, seperti cakupan data yang terbatas pada provinsi tertentu dan tidak termasuk faktor-faktor lain yang mungkin memengaruhi ketimpangan pendapatan.

Saran untuk penelitian selanjutnya perlu memperluas cakupan data serta mempertimbangkan faktor-faktor tambahan untuk memperdalam pemahaman tentang ketimpangan pendapatan di tingkat regional. Kemudian di masa mendatang pemerintah diharapkan melakukan evaluasi efektivitas alokasi dana publik seperti DAU, DAK, dan DBH, serta memberikan insentif untuk peningkatan investasi

asing. Untuk mengurangi ketimpangan pendapatan, pemerintah juga harus mempertimbangkan kebijakan yang mendukung peningkatan UMP. Selain itu, upaya diperlukan untuk meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan di semua lapisan masyarakat.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Muslikhah, A., & Utami, E. (2019). Pengaruh Inklusi Keuangan terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia tahun 2012-2017. *Seminar Nasional Official Statistic, 2019(1)*, 738-748.
- Kusuma, A. A., & Indrajaya, B. G. (2020). Analisis pengaruh Inklusi Keuangan terhadap Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *Jurnal Harian Regional*, 9(5), 993-1022.
- Makutaning, D. D., Setiadi, Y., Ikhwanuddin, M., & Fadhilah, L. A. (2022). Kontribusi Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Kelompok Ketimpangan Pendapatan Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 22(2), 221-242.
- Restulillah, F. H., & Ariusni. (2020). Pengaruh Financial Development Investasi Asing Langsung dan Urbanisasi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 2(4), 69-74.
- Santoso, F. D., & Mukhlis, I. (2021). Ketimpangan Pendapatan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi pada masa sebelum dan pada saat Pandemi COVID-19 di Indonesia . *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Pendidikan*, 1(2), 147-162.
- Firmansyah, U., Junaidi, & Achmad, E. (2022). Pengaruh Nilai Tukar Petani, Indeks Pembangunan Manusia dan PDRB Sektor Pertanian terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera. *Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 11(1), 9-14.
- Petrakos, G., Rontos, K., Vavoura, C., & Vavouras, I. (2023). The Impact of Recent Economic Crises on Income Inequality and the Risk of Poverty in Greece. *Economies*, 11(6), 2-23.
- Muslimah, H., & Putri, D. Z. (2021). Pengaruh Aglomerasi, Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Ketimpangan Pendidikan, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 3(3), 9-18.
- Hindun., Soejoto, A., & Hariyati. (2019). Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 8(3), 250-265.
- Irmawatty, P. T., Tajuddin., Ahmad., Aedy, H., & Balaka, M. Y. (2022). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Pulau. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, 7(2), 206-216.
- Haughton, J., & Khandker, S. R. (2009). *Handbook on Poverty and Inequality*.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development 12th ed.*
- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomi Pembangunan*.

- Ridho, M. A., & Wijayanti D. (2022). Analisis pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan*, 1(1), 71-81.
- Farhan, M. & Sugianto. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Ketimpangan Pendapatan Di Pulau Jawa. *Si Batik Journal*, 1(4), 243-258.
- Kiak. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal, Kesejahteraan Masyarakat terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 8(2), 137-144.
- Hulu, P. K., & Wahyuni, K. T. (2021). Kontribusi Pembangunan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia Tahun 2010-2019. *Seminar Nasional Official Statistics, 2021*(1), 603-612.
- Yoertiara, R. F. & Feriyanto, N. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Ketimpangan Pendapatan Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan*, 1(1), 92-100.
- Andina, R. D., & Supriyanto, S. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Pulau Jawa Tahun 2014-2020. *Jurnal Ilmiah Matematika dan Pendidikan Matematika*, 13(1) 1-14.
- Violin, Z. I., & Lutfi, M. Y. (2022). Analisis Ketimpangan Pendapatan Di Pulau Jawa dan Faktor yang Mempengaruhinya tahun 2010- 2019. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(1), 227-252.
- Sukirno, S. (2006). *Pengantar Teori Makroekonomi*.
- Kuznet, S. (1995). *Economic Growth and Income Inequality*.
- Durlauf, S. N. & Blume, L. (1987). *The New Palgrave Dictionary of Economics*.